

**DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
KABUPATEN PONOROGO**



# **RENJA RENCANA KERJA**

**DINAS PERDAKOP & UM  
KABUPATEN PONOROGO**

**2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah S.W.T dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik dan lancar. Renja merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode satu tahun.

Dengan disusunnya Renja Tahun 2025 diharapkan pelaksanaan pembangunan di bidang perdagangan, koperasi dan usaha mikro serta bidang perindustrian lebih terintegrasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi. Sehingga pada akhirnya nanti akan tercapai masyarakat yang sejahtera sebagaimana visi Kabupaten Ponorogo yaitu **“Mewujudkan Kabupaten Ponorogo HEBAT (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan Takwa)”**.

Selanjutnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya dokumen Renja Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 ini kami sampaikan terima kasih. Akhirnya semoga yang tertuang dalam dokumen Renja Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 ini bermanfaat sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 30 April 2025

KEPALA DINAS  
PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
KABUPATEN PONOROGO

  
**RINGGA DWI HERI IRAWAN, S.STP, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197512091996031001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN .....	6
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Landasan Hukum .....	9
1.3 Maksud dan Tujuan .....	11
1.4 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025 .....	13
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	13
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	51
2.2.1 Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Pertumbuhan Usaha Mikro di Kabupaten Ponorogo	53
2.2.2 Sasaran 2 Meningkatnya nilai perdagangan .....	57
2.2.3 Sasaran 3 Meningkatnya kualitas dan pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Ponorogo .....	59
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	66
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	71
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .	93
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	104
BAB IV PENUTUP.....	126

## Daftar Gambar

Gambar 1. Diagram Perkembangan Koperasi .....	54
Gambar 2. Diagram Perkembangan Volume Usaha Koperasi .....	55
Gambar 3. Diagram pertumbuhan omset usaha mikro .....	56
Gambar 4. Grafik perkembangan nilai perdagangan.....	58
Gambar 5. Jumlah Perkembangan IKM.....	59

## Daftar Tabel

Tabel 1. Label T-C.29 .....	50
Tabel 2. Label T-C.30 .....	52
Tabel 3. Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2024 .....	61
Tabel 4. Label T-C.31 .....	92
Tabel 5. Label T-C.32 .....	103

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai upaya Pemerintah Daerah memenuhi amanat peraturan perundang-undangan, khususnya:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; dan
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Maka dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan, Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025, dipandang perlu menerbitkan Surat Edaran Bupati Ponorogo Tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 dalam rangka Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025.

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja) SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja SKPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Perangkat Daerah (SKPD) pada Tahun 2025 ini merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Dokumen ini akan bermanfaat bagi Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo dan lembaga terkait dalam rangka mewujudkan keterpaduan pelaksanaan maupun pembiayaan program untuk tahun 2025.

Renja SKPD berperan penting dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah. Penyusunan Renja SKPD Tahun 2025 mengacu kepada perencanaan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Ponorogo, didasarkan oleh alasan sebagai berikut:

1. Perubahan tugas pokok dan fungsi SKPD Tahun 2018.
2. Penyusunan indikator dalam Rencana Kerja Tahun 2025 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2007, dan indikator SPM yang dikeluarkan oleh kementerian teknis masing-masing SKPD dengan memperhatikan Rencana Aksi Nasional (RAN).
3. Penyusunan Rencana Kerja ini sebagai bentuk komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ponorogo.

Dalam dokumen Renja SKPD, Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo sejak awal tahapan penyusunan mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Setiap program dan kegiatan dalam Renja SKPD Tahun 2025 menyajikan nilai pagu indikatif dan indikator capaian telah melalui proses verifikasi oleh BAPPEDA LITBANG dan dianalisis dengan strategi prioritas serta kemampuan kinerja daerah secara menyeluruh.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD pada Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, pemerintahan daerah Propinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Ponorogo;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Ponorogo;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
12. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021– 2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2017;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



16. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 157 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro;
17. Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026.
18. Reviu Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026.
19. Reviu kedua Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026.
20. Reviu ketiga Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026.
21. Reviu keempat Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026.
22. Perubahan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan RENJA SKPD Tahun 2025 ini adalah :

1. Mengkaji RKPD Kabupaten Ponorogo berdasarkan evaluasi kinerja SKPD tahun sebelumnya, evaluasi pencapaian target RENSTRA SKPD, usulan masyarakat/pemangku kepentingan, serta kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Disusunya Rencana Kerja SKPD Tahun 2025 adalah menyediakan arah acuan bagi Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi.
2. Merumuskan Daftar Program, Kegiatan, dan Kebutuhan Anggaran Indikatif yang akan dilaksanakan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo pada Tahun Anggaran 2025.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD Tahun 2025 ini adalah sebagai dokumen perencanaan adalah agar terdapat sinerginitas dan kontinuitas dalam perencanaan program dan kegiatan di Kabupaten Ponorogo.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan
- 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

#### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **BAB V PENUTUP**

## BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2023 perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas program dan kegiatan yang berdampak pada pencapaian indikator kinerja utama sebagaimana tertuang di dalam Renstra dan telah diperjanjikan di perjanjian kinerja setiap tahunnya. Pengukuran dilakukan terhadap indikator program maupun kegiatan tahun berjalan, tahun sebelumnya, serta proyeksi tahun yang akan datang, secara keseluruhan kami tuangkan ke dalam **format A (terlampir)**.

Format A

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA  
RENJA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN PONOROGO  
TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

No	Sasaran	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021- 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab		
				I	II	III	IV	12 = 8 + 9 + 10 + 11	13=6+12	14=13/5x 100%												
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11	12 = 8 + 9 + 10 + 11		13=6+12		14=13/5x 100%	15		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan	Program Peningkatan Administrasi dan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase administrasi yang memenuhi standart tata kelola pemerintah	100%	9.984.358.702	0%	11.106.143.620	100%	10.833.784.542	32,44 %	3.514.746.674					32,44 %	3.514.746.674	100%	14.620.890.294	100%	14 %	DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO



apan rumah tangga dan urusan Kepegawain kepada semua unsur di lingkungan Dinas	Prosentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran perangkat daerah secara partisipatif dan tepat waktu	100%		0%		100%									0,00%		100%		100%
	Pencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	7.500.000	24 dokumen	59.091.500	24 dokumen	58.605.282	6 dokumen	9.691.000						24 dokumen	9.691.000	24 dokumen	68.782.500	24 dokumen



	participasi dan tepat waktu																		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangka Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah yang disusun	6 dokumen	3.750.000	6 dokumen	29.991.000	6 dokumen	29.999.800	2 dokumen	9.691.000					6 dokumen	9.691.000	6 dokumen	39.682.000	6 dokumen	1058%



	Koor dinas i dan Peny usun an Lapo ran Capa ian Kiner ja dan Ikhti sar Real isasi Kiner ja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusun an laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	18 Lapora n	3.750.0 00	18 dokum en	29.100.5 00	18 doku men	28.605.4 82	4 doku men	0						18 doku men	0	18 doku men	29.100.5 00	18 dok ume n	77 6 %
	<b>Adm inistr asi Keua ngan Peran gka t Daer ah</b>	<b>Prosent a se penyusu nan dokumen perencana an dan pelapora n program /kegiata n/sub kegiatan dan anggaran perangka t daerah</b>	100%	7.607.9 62.800	0	8.134.62 5.317	100%	8.672.77 1.800	29,75 %	2.580.0 50.320					29,75 %	2.580.0 50.320	100%	10.714.6 75.637	100 %	14 1 %	

	secara partisipatif dan tepat waktu																		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	95 orang/bulan	6.897.069.000	1 tahun	6.973.048.542	95 orang/bulan	7.627.772.200	95 orang/bulan	2.342.562.320					95 orang/bulan	2.342.562.320	95 orang/bulan	9.315.610.862	95 orang/bulan	135%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil pelayanan administrasi pelaksanaan tugas ASN	36 dokumen	705.893.800	64 orang	1.136.724.775	36 dokumen	1.015.000.000	9 dokumen	237.488.000					36 dokumen	237.488.000	36 dokumen	1.374.212.775	36 dokumen	195%





Adm instr asi Kepe gaw aian Pera ngka t Daer ah	Prosent se pelayan an administr asi umum dan kepegaw aian serta penyedia an prasaran a perangka t daerah yang memadai	80%	0	20%	1.162.16 0.000	100%	551.150. 000	97,67 %	538.290 .000				97,67 %	538.29 0.000	100%	1.700.45 0.000	100 %	0 %
Pend idika n dan Pelat ihan Pega wai Berd asark an Tuga s dan Fung si	Jumlah pegawai berdasar kan tugas dan fungsi yang mengikut i pendidik an dan pelatihan	15 orang	0	15 orang	1.162.16 0.000	15 orang	551.150. 000	15 orang	538.290 .000				15 orang	538.29 0.000	15 orang	1.700.45 0.000	15 ora ng	0 %



Adm instr asi Umu m Pera ngka t Daer ah	Prosentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan prasarana perangkat daerah yang memadai	100%	798.78 3.450	80%	504.467. 634	100%	390.682. 800	10,55 %	41.223. 187				10,55 %	41.223. 187	100%	545.690. 821	100 %	68 %
Peny edia an Kom pone n Insta lasi Listri k/Pe nera ngan Bang unan Kant or	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	5.000.0 00	50 Paket	7.556.00 0	50 Paket	0	0	0				50 Paket	0	50 Paket	7.556.00 0	50 Pak et	15 1 %

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	35.000.000	0	0	3 Paket	24.924.000	0	0									
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 paket	250.000.000	100 paket	200.138.600	100 paket	142.563.300	100 paket	15.552.500				100 paket	15.552.500	100 paket	215.691.100	100 paket	86 %
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	130.307.600	12 Paket	161.859.700	12 paket	140.000.000	12 paket	50.000				12 paket	50.000	12 paket	161.909.700	12 paket	124 %



Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	41.240.000	12 dokumen	25.358.000	12 dokumen	32.000.000	12 dokumen	2.152.000									12 dokumen	67 %				
Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	337.235.850	12 laporan	109.555.334	12 laporan	51.195.500	12 laporan	23.468.687									12 laporan	39 %				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.469.12.452	80%	1.093.595.881	100%	1.010.574.660	24,71 %	325.652.072									24,71 %	325.652.072	100%	1.419.247.953	100 %	97 %



Daerah																			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	79.860.000	12 laporan	11.950.000	12 laporan	0	12 laporan	0					12 laporan	0	12 laporan	11.950.000	12 laporan	15%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	1.166.706.080	36 laporan	1.015.415.181	36 laporan	968.574.660	36 laporan	325.652.072					36 laporan	325.652.072	36 laporan	1.341.067.253	36 laporan	115%



Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	39.821.100	12 laporan	46.459.000	12 laporan	30.000.000	12 laporan	0						12 laporan	0	12 laporan	46.459.000	12 laporan	117%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	182.725.272	12 laporan	19.771.700	12 laporan	12.000.000	0	0						12 laporan	0	12 laporan	19.771.700	12 laporan	11%
Pemeriksaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Perintahan Daerah	Prosentase pelaksanaan administrasi realisasi anggaran serta pengelolaan pencatatan aset yang akuntablene	80%	101.000.000	80%	152.203.288	100%	150.000.000	13,23%	19.840.095						13,23%	19.840.095	100%	172.043.383	100%	170%

ah																			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan nya	5 unit	101.000.000	6 unit	152.203.288	6 unit	150.000.000	6 unit	19.840.095					24 unit	19.840.095	6 unit	172.043.383	6 unit	170%

Meningkatnya Koperasi dan Usaha Mikro yang mengalami peningkatan SHU dan omset	Program Pendidikan dan Latihan Perkerasian	Presentase peningkatan volume usaha koperasi	10%	404.200.000	0	0	10%	327.000.000	85,08%	278.210.000										
	Pendidikan dan Latihan Perkerasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkerasian	80%	404.200.000	0	0	80%	327.000.000	80%	278.210.000										

		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkerasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkerasian	270 orang	404.200.000	0	0	180 orang	327.000.000	45 orang	278.210.000								
5	Meningkatnya kualitas koperasi dan pertumbuhan Usaha Mikro di Kabupaten Ponorogo	Program Pembedayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan	Prosentase usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil dan menengah	2,50%	50.000.000	0	0	2,50%	47.000.000	0,00%	0	0,00%	0	2,50%	0	2,50%	0	2,50%	0%



		Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan																	
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang mengikuti kemitraan	25 Unit Usaha	50.000.000	0	0	10 Unit Usaha	47.000.000	0	0			150 Unit Usaha	0	46 orang	0	46 orang	%0
7	Meningkatnya nilai perdagangan	Program Perizinan dan Pendaftaran	Prosentase pelaku usaha yang mengajukan perijinan	11,5%	5.000.000	100%	23.824.000	13,8%	17.000.000	61,47%	10.450.000			0%	10.450.000	11,5%	34.274.000	11,5%	68%5



	Perusahaan																		
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swakarya	Prosentase pelaku usaha yang mengajukan perijinan	50%	5.000.000	50%	14.700.000	13,8%	10.000.000	0%	9.750.000				50%	9.750.000	50%	24.450.000	<b>50%</b>	<b>489%</b>



		ronik																			
		<b>Pene rbita n Tanda Daftar Gudang</b>	<b>Prosentase penerbitan tanda daftar gudang</b>	50%	5.000.000	50%	6.999.000	13,8%	3.000.000	0%	0					50%	0	50%	6.999.000	<b>50%</b>	<b>140%</b>
		Fasilitasi Pene rbita n Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	12 dokumen	5000000	12 dokumen	6.999.000	12 dokumen	3.000.000	0	0					12 dokumen	0	12 dokumen	6.999.000	<b>12 dokumen</b>	<b>0%</b>





		Fasilitas Penerimaan Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengedaran dan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengedaran dan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 dokumen	5.000.000	12 dokumen	2.125.000	12 dokumen	4.000.000	3 dokumen	700.000					12 dokumen	700.000	0	0	0	0%
8	Meningkatnya nilai perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi	Prosentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	100%	5.911.644.098	100%	3.161.224.191	100%	2.152.000.000	22,39%	481.911.253					22,39%	481.911.253	100%	3.643.135.444	100%	61,63%



Perdagangan																			
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Indeks sarana dan prasarana perdagangan	60%	5.911.644.098	60%	2.709.340.463	60%	2.152.000.000	15%	481.911.253					15%	481.911.253	60%	3.191.251.716	60%	53,98%
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	28 unit	5.911.644.098	28 unit	2.709.340.463	28 unit	2.152.000.000	7 unit	481.911.253					28 unit	481.911.253	28 unit	3.191.251.716	28 unit	53,98%



9	Meningkatnya nilai perdagangan	<b>Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</b>	<b>Prosentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting</b>	0,22%	49.000.000	0,22%	143.261.000	100%	358.400.000	79,49 %	284.880.000							79,49 %	284.880.000	0,22%	428.141.000	<b>0,22%</b>	873,76 %
		<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasa</b>	<b>Prosentase pengendalian harga dan stok barang penting di tingkat pasar</b>	0,22%	49.000.000	0,22%	143.261.000	18 monitoring	358.400.000	0,055 %	284.880.000								0,06%	284.880.000	0,22%	428.141.000	<b>0,22%</b>

r Kabu pate n/Ko ta																			
Pelak sana an Oper asi Pasa r Regu ler dan Pasa r Khus us yang Berd amp ak dala m 1 (Satu ) Kabu pate n/Ko ta	Jumlah Laporan Pelaksa aan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdamp ak dalam 1 (Satu) Kabupate n/Kota	12 laporan	5.000.0 00	0	106.271. 000	12 lapora n	47.000.0 00	0	1.000.0 00					12 lapora n	1.000.0 00	0	0	0	0, 00 %



11	Meningkatnya nilai perdagangan	<b>Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen</b>	<b>Prosentase pencapaian standarisasi dan perlindungan konsumen</b>	10%	205.000.000	66,15%	49.758.000	0,1%	26.555.000	1,58%	420.000							1,58%	420.000	10%	50.178.000	10%	<b>24%</b>	
		<b>Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa, Tera, dan Ulang</b>	<b>Prosentase pelaksanaan metrologi legal berupa, tera ulang dan pengawasan</b>	100%	205.000.000	50 Kegiatan	49.758.000	100,0%	26.555.000	100%	420.000								100%	420.000	100%	50.178.000	100%	<b>24%</b>
		<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa, Tera, dan Ulang</b>	<b>Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang</b>	10000 UTTP	205.000.000	10000 UTTP	49.758.000	10000 unit	26.555.000	10000 UTTP	420.000								10000 UTTP	420.000	10000 UTTP	50.178.000	10000 UTTP	<b>24%</b>

	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>Prosentase penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri</b>	50%	6.000.000	0	0	50%	115.486.500	27,29%	31.518.000										
	<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	<b>Prosentase promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri</b>	50%	6.000.000	0	0	50%	115.486.500	50%	31.518.000										

		Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	2 UMKM	6.000.000	0	0	2 UMKM	115.486.500	2 UMKM	31.518.000										
13	Meningkatnya pertumbuhan IKM	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Prosentase Capaian Pelaksanaan Perencanaan dan Pengembangan Industri	100%	120.000.000	100%	950.993.750	0,25%	2.164.438.842	4,30%	93.075.000					4,30%	93.075.000	100%	1.044.068.750	100%	870%





	Koor dinas i, Sinkr onisa si, dan Pelak sana aan Pemberd ayaa n Indu stri dan Pera n Serta Masy arak at	Jumlah Dokumen Hasil Koordina si, Sinkronis asi, dan Pelaksan aan Pemberd ayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokum en	20.000. 000	6 dokum en	488.134. 000	6 doku men	2.019.89 4.142	2 doku men	0								6 doku men	0	6 doku men	488.134. 000	6 doku men	<b>24 41 %</b>	
	Koor dinas i, Sinkr onisa si, dan Pelak sana aan Pembang unan Sumber Daya Indu	Jumlah Dokumen Hasil Koordina si, Sinkronis asi, dan pelaksan aan Pembang unan Sumber Daya Industri	1 dokum en	100.00 0.000	1 dokum en	0	1 doku men	95.600.0 00	1 doku men	90.175. 000														





	Koor dinas i, Sinkr onisa si, dan Pelak sana an Pemb angan Sara na dan Pras aran a Indu stri	Jumlah Dokumen Hasil Koordin asi, Sinkron isasi, dan Pelaksa naan Pembang unan Sarana dan Prasaran a Industri	6 doku men	0	6 doku men	344.473. 400	6 doku men	34.999.7 00	0	2.900.0 00							6 doku men	2.900.0 00	6 doku men	347.373. 400	6 doku men	0	
	<b>PRO GRA M PEN GEL OLA AN SIST EM INFO RMA SI IND UST RI NASI ONA L</b>	<b>Prosentase capaian pengelol aan sistem informasi industri nasional</b>	100%	100.00 0.000	0	0	100%	6.000.00 0	0,00%	0													





	6%	%							
Predikat Kinerja									
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :									
1	Tingginya minat masyarakat untuk menjadi anggota koperasi dengan memanfaatkan kemudahan fasilitas pinjaman sehingga volume usaha koperasi meningkat.								
2	Adanya fasilitasi/pelatihan dalam rangka peningkatan usaha IKM melalui pelatihan-pelatihan bagi IKM								
3	Peningkatan omset IKM melalui promosi produk-produk unggulan IKM di pameran								
4	Tingginya minat masyarakat, khususnya untuk mendirikan usaha Industri Kecil Menengah								
Faktor penghambat capaian kinerja									
1	Terbatasnya pegawai yang mempunyai keahlian sebagai penilai kesehatan koperasi								

**Tabel 1. Label T-C.29**

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Selanjutnya untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kegiatan di Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Strategis tersebut maka perlu dilakukan Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja tahun 2024 yang telah ditetapkan di dalam Renstra SKPD, adapun hasilnya sebagaimana tertuang dalam tabel T-C.30.

Tujuan 1 : Meningkatkan Potensi dan Daya Saing Sektor Koperasi dan Usaha Mikro

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas koperasi dan pertumbuhan Usaha Mikro di Kabupaten Ponorogo.

Tujuan 2 : Meningkatkan Pertumbuhan Industri dan Perdagangan

Sasaran 1 : Meningkatnya nilai perdagangan.

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas dan pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Ponorogo

**Format B**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro  
Kabupaten Ponorogo**

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Prosentase koperasi aktif			85%	-	100%	100%	85%	85%	100%	100%	
2	Prosentase Koperasi yang dinilai kesehatannya			80%	80%	82%	85%	80%	80%	82%	85%	
3	Prosentase peningkatan Volume Usaha Koperasi			10%	27,50%	27,50%	27,50%	27,50%	27,50%	27,50%	27,50%	
4	Prosentase Peningkatan Omset Usaha mikro			80%	80%	82%	85%	80%	80%	82%	85%	
5	Prosentase usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil dan menengah			10%	10%	20%	20%	10%	10%	20%	20%	
6	Prosentase peningkatan nilai perdagangan			2,50%	2,50%	2,75%	2,75%	2,50%	2,50%	2,75%	2,75%	
7	Prosentase pertumbuhan IKM			0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	

Tabel 2. Label T-C.30

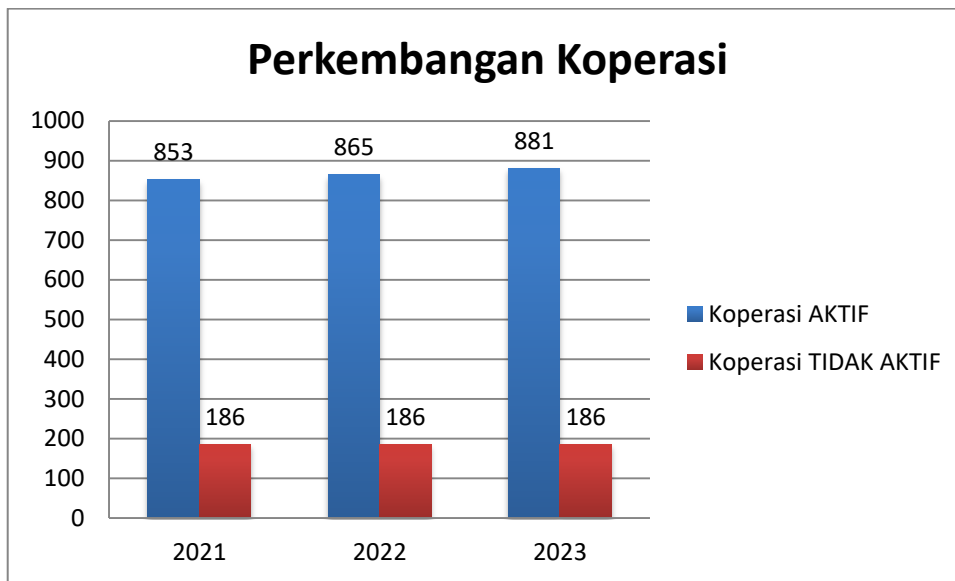
### **2.2.1 Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Pertumbuhan Usaha Mikro di Kabupaten Ponorogo**

Sasaran ini merupakan turunan dari tujuan 1 yang merupakan salah satu sasaran dari kepala daerah Kabupaten Ponorogo. Untuk mengukur keberhasilan sasaran ini dilihat dari capaian indikator sasaran prosentase koperasi aktif sampai akhir Desember 2024. Realisasi pada indikator ini sebesar 81,54%, jika dijabarkan terdapat 881 koperasi aktif dari 1.067 koperasi yang ada di Kabupaten Ponorogo. Jumlah koperasi di Kabupaten Ponorogo bertambah secara dinamis. Di akhir tahun 2023 jumlah koperasi di Kabupaten Ponorogo sebanyak 865 koperasi aktif dan bertambah menjadi 881 koperasi aktif di akhir tahun 2023. Adapun faktor yang mempengaruhi ketidak berhasilan tingkat capaian adalah :

1. Banyak koperasi yang tidak aktif tetapi belum dilakukan pembubaran, sehingga tetap masuk dalam daftar koperasi. Kondisi seperti ini akhirnya mempengaruhi prosentase koperasi aktif di Kabupaten Ponorogo;
2. Kebutuhan anggaran yang sangat besar untuk melakukan pembubaran koperasi tidak aktif, sehingga pelaksanaannya tertunda karena anggaran masih dipergunakan untuk program kegiatan yang lebih prioritas untuk membangun kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ponorogo melalui koperasi; dan
3. Tingkat kesadaran pemilik koperasi tidak aktif yang masih rendah yang tidak segera melaporkan ketidak aktifan koperasi ke Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro; dan

- Persaingan antar koperasi yang sangat ketat sehingga membuat koperasi dengan kemampuan usaha rendah semakin tersisih oleh koperasi dengan kemampuan besar.

Data perkembangan koperasi di Kabupaten Ponorogo selama 3 tahun terakhir sebagai berikut :



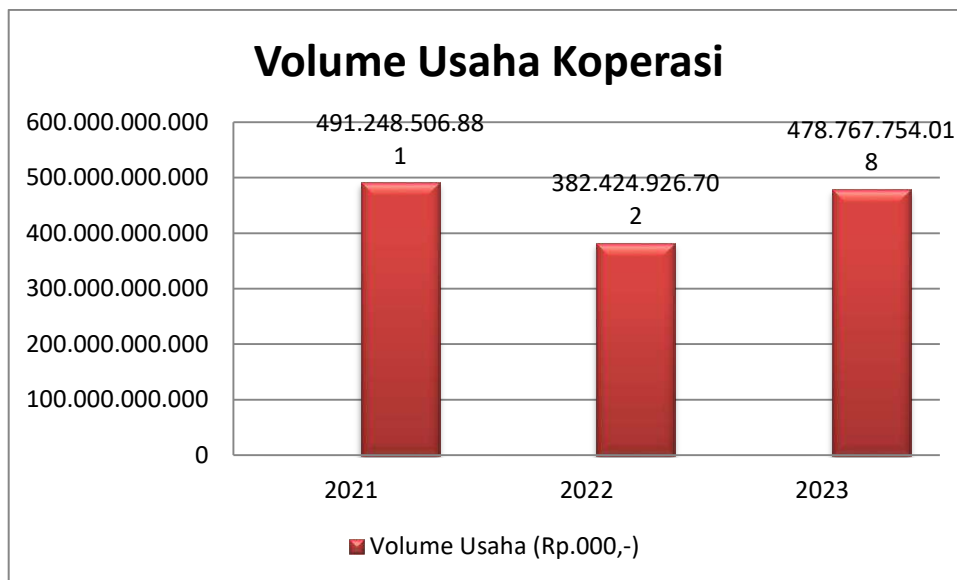
Gambar 1. Diagram Perkembangan Koperasi

Indikator sasaran kedua adalah Prosentase peningkatan volume usaha koperasi. Pada indikator ini tingkat capaiannya sangat tinggi yaitu 91,20%. Jika dijabarkan tingkat capaian tersebut adalah perbandingan antara realisasi dengan target. Realisasi peningkatan volume usaha koperasi tahun 2021 sampai dengan akhir tahun 2023 adalah Rp. 94.430.548.209,- atau 25,20%. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian pada indikator ini adalah :

- Meningkatnya partisipasi anggota koperasi karena semakin tingginya kesadaran akan berkoperasi;

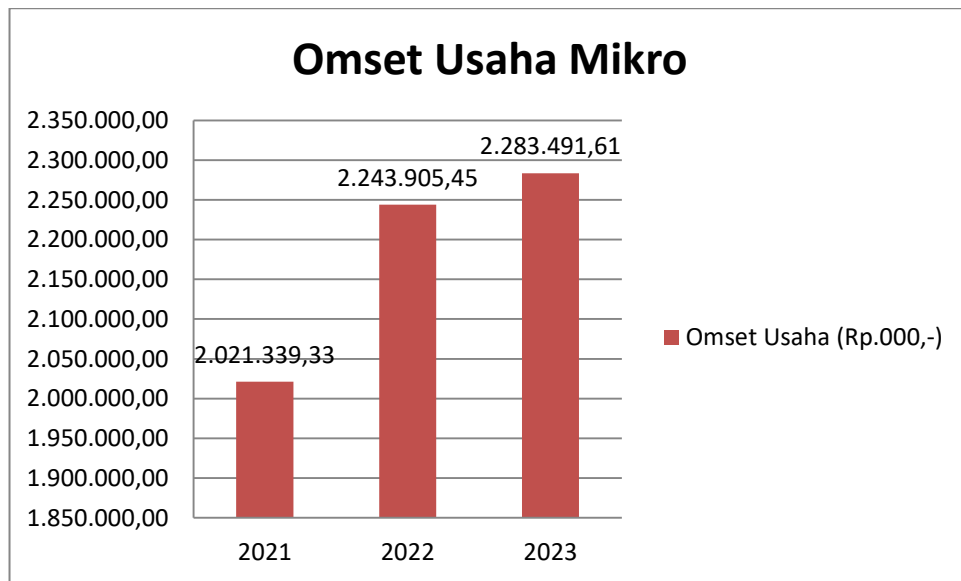
2. Kinerja keuangan dan tingkat kesehatan usaha koperasi semakin baik karena pengetahuan pengurus akan koperasi semakin meningkat;
3. Intensitas kegiatan pembinaan, pengawasan dan pendampingan terhadap tata kelola koperasi; dan
4. Kerja sama antara pengurus, pengawas, dan anggota dalam menjalankan koperasi menumbuhkan kekompakan dan sinergitas yang positif.

Data perkembangan volume usaha koperasi di Kabupaten Ponorogo selama 3 tahun terakhir sebagai berikut :



Gambar 2. Diagram Perkembangan Volume Usaha Koperasi

Indikator sasaran yang ketiga adalah Prosentase usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil dan menengah. Indikator ini adalah tolok ukur pencapaian kinerja pada sasaran peningkatan pertumbuhan usaha mikro Kabupaten Ponorogo. Tingkat pertumbuhan omset usaha mikro tahun 2023 sebesar Rp. 40.659.950 atau sebesar 2%. Pertumbuhan omset Usaha Mikro mengalami kenaikan setiap tahunnya. Berikut diagram data perkembangan omset usaha mikro dalam kurun waktu 3 tahun terakhir :



Gambar 3. Diagram pertumbuhan omset usaha mikro

Peningkatan Omset Usaha Mikro mengalami kenaikan dua kali lipat dari target yaitu sebesar 3% dengan tingkat capaian 200% dan dikategorikan Sangat Tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan antara lain:

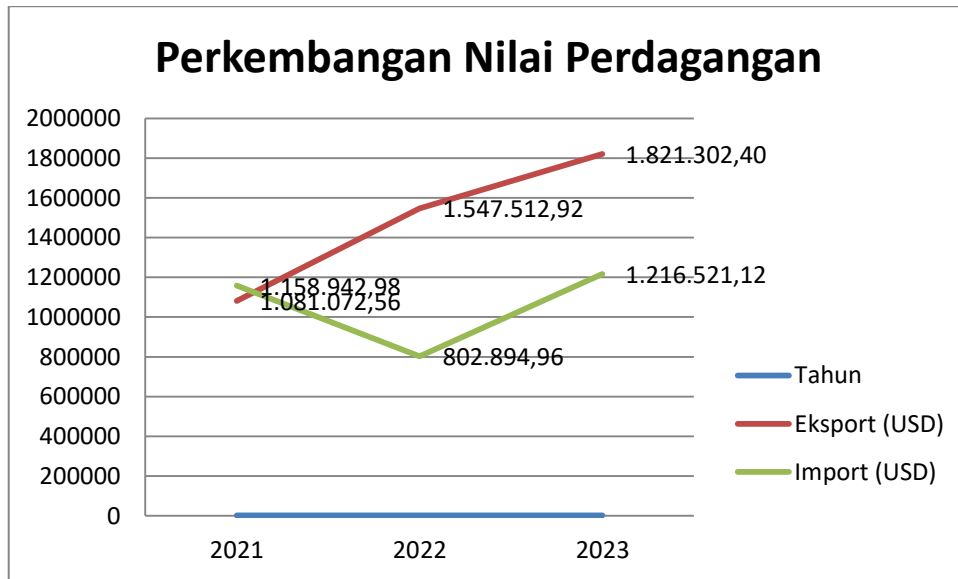
1. Persaingan usaha yang mulai terbuka antara masing-masing pengusaha mikro dalam melakukan pemasaran produk masing-masing;
2. Layanan pembiayaan dari Pemerintah Kabupaten untuk usaha mikro dengan bunga yang sangat rendah dibandingkan dengan lembaga perbankan; dan
3. Persepsi masyarakat mulai berubah bahwa membentuk usaha itu tidak sesulit yang dibayangkan, sehingga pola pikir masyarakat sudah mulai beralih untuk menciptakan usaha mandiri.

Dalam upaya untuk meningkatkan tingkat capaian kinerja terhadap sasaran yang telah ditetapkan tersebut terdapat beberapa rencana aksi yang akan dilaksanakan di tahun 2024 antara lain program-program yang mengarah pada pelatihan ketrampilan, motivasi, administrasi dan pengelolaan koperasi;

1. Memperbanyak pegawai yang mempunyai keahlian sebagai penilai kesehatan koperasi sehingga penilaian kesehatan koperasi dapat dilaksanakan lebih maksimal dan menyeluruh.
2. Membentuk program kegiatan yang mengarah pada peningkatan inovasi dan kreatifitas pengusaha mikro dan masyarakat dalam pengembangan produk-produknya;
3. Meningkatkan pelatihan dan pembinaan bagi masyarakat yang mengarah pada penciptaan wirausaha baru di Kabupaten Ponorogo

### **2.2.2 Sasaran 2 Meningkatnya nilai perdagangan**

Sasaran ini merupakan turunan dari tujuan 2. Peningkatan pertumbuhan industri dan perdagangan di Kabupaten Ponorogo diukur dengan indikator yang pertama adalah prosentase peningkatan nilai perdagangan. Perdagangan di Kabupaten Ponorogo terdiri dari perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Untuk saat ini perdagangan dalam negeri lebih dominan dalam komposisi nilai perdagangan, karena untuk perdagangan luar negeri hanya ditopang oleh beberapa exportir yang jumlahnya relatif sedikit. Berikut perkembangan nilai perdagangan di Kabupaten Ponorogo selama 3 tahun terakhir:



Gambar 4. Grafik perkembangan nilai perdagangan

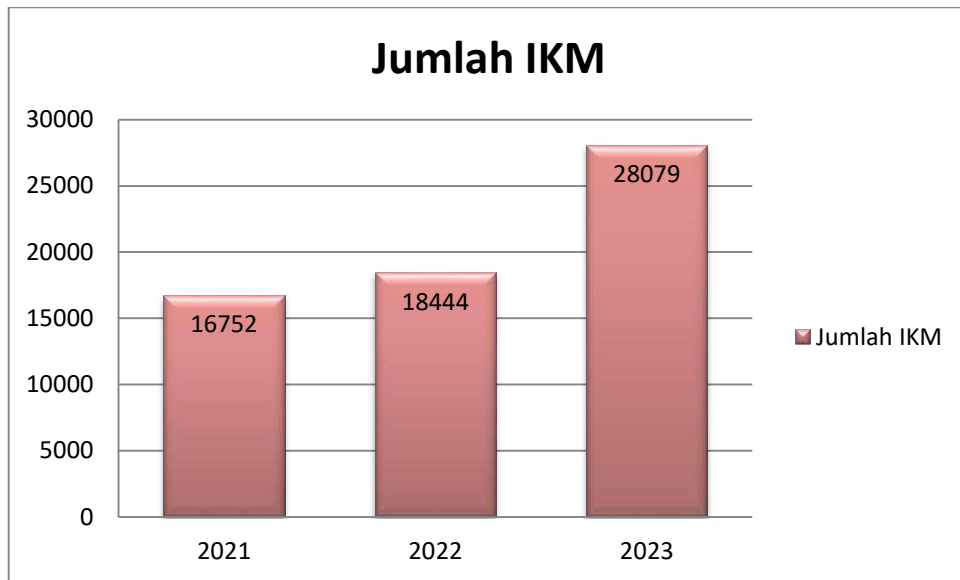
Grafik diatas memperlihatkan bahwa nilai perdagangan di Kabupaten Ponorogo tahun 2021-2023. Sedangkan target yang telah ditetapkan tahun 2023 adalah 2,50%, sehingga capaian kinerja diangka 100% dapat dikategorikan Sangat Tinggi.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan di tahun 2024 oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo untuk mencapai sasaran antara lain:

1. Promosi produk-produk unggulan Kabupaten Ponorogo di tingkat lokal maupun nasional;
2. Pemantauan terhadap peredaran bahan-bahan pokok dan strategis yang beredar di masyarakat;
3. Peningkatan dan pengembangan sarana perdagangan;
4. Pembinaan dan pengawasan kepada pemilik gudang barang pokok dan penting;
5. Penertiban perijinan usaha kepada pelaku usaha;
6. Pelayanan kemetrolagian kepada masyarakat untuk alat Ukur Timbang Takar dan Perlengkapannya; dan
7. Peningkatan pelayanan pasar-pasar daerah dan revitalisasi pasar-pasar daerah Kabupaten Ponorogo.

### 2.2.3 Sasaran 3 Meningkatnya kualitas dan pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Ponorogo

Sasaran ini merupakan turunan dari tujuan 2. Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro yang fokus pada kualitas dan pertumbuhan IKM di Kabupaten Ponorogo. Tolok ukur penilaian capaian kinerja pada sasaran ini adalah prosentase pertumbuhan IKM.



Gambar 5. Jumlah Perkembangan IKM

Pertumbuhan IKM di tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 10,48% atau sejumlah 2.335 IKM Baru. Meskipun mengalami kenaikan tetapi jika dibandingkan dengan target sebesar 30% yang ditetapkan, capaian kinerja termasuk dalam kategori Tinggi. Adapun faktor yang keberhasilan antara lain:

1. Tingginya minat masyarakat, khususnya untuk mendirikan usaha Industri Kecil Menengah.
2. Adanya fasilitasi/pelatihan dalam rangka peningkatan usaha IKM melalui pelatihan-pelatihan bagi IKM.

3. Peningkatan omset IKM melalui promosi produk-produk unggulan IKM di pameran.

Faktor yang mempengaruhi ketidak berhasilan yaitu adanya kendala tidak terserapnya anggaran khususnya pada Program Perencanaan dan Pembangunan Industri kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

Dari faktor ketidak berhasilan tersebut, maka Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo memiliki rencana aksi untuk memperbaiki capaian kinerja di tahun 2023 sebagai berikut :

1. Membentuk program kegiatan yang mengarah pada peningkatan inovasi dan kreatifitas IKM dalam pengembangan produk-produknya;
2. Pendampingan dan monitoring bagi wirausaha pemula/IKM baru untuk bisa mendapatkan akses pembiayaan permodalan dari lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan pemerintah.
3. Pendampingan dalam kegiatan pemasaran dalam hal ini bisa diikuti setakan dalam pameran dan promosi di media sosial (Instagram, Facebook, dll) serta *market place* lokal (Jathitlmart).

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan 31 Desember 2024, total alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 4.163.287.021,- (*Empat milyar seratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua puluh satu rupiah*). Realisasi anggaran selama Tahun Anggaran 2024 sejumlah Rp. 14.624.197.662,- (*Empat belas milyar enam ratus dua puluh empat juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh dua rupiah*) atau terealisasi sebesar 96,33% dan alokasi belanja tidak langsung dengan anggaran sebesar Rp. 7.323.870.000,- (*Tujuh*

milyar tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 6.973.048.542,- (Enam milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta empat puluh delapan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) atau terealisasi sebesar 95,21%.

**Tabel 3. Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2024**

No	Program/Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)
		Alokasi	Realisasi	
<b>I</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>7.323.870.000</b>	<b>6.973.048.542</b>	<b>95,21%</b>
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>4.163.287.021</b>	<b>4.133.095.078</b>	<b>99,27%</b>
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>11.487.157.021</b>	<b>11.106.143.620</b>	<b>96,68%</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>59.165.282</b>	<b>59.091.500</b>	<b>99,88%</b>
i.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.999.800	29.991.000	99,97%
ii.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.165.482	29.100.500	99,78%
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>8.491.879.675</b>	<b>8.134.625.317</b>	<b>95,79%</b>
i.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.323.870.000	6.937.048.052	95,21%
ii.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.143.120.175	1.136.724.775	99,44%
iii.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.999.800	14.991.500	99,94%
iv.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9.889.700	9.860.500	99,70%
<b>3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>1.162.760.000</b>	<b>1.162.160.000</b>	<b>99,95%</b>
i.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.162.760.000	1.162.160.000	99,95%
<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>512.338.715</b>	<b>504.467.634</b>	<b>98,46%</b>

i.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.565.500	7.556.000	99,87%
ii.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	201.244.350	200.138.600	99,45%
iii.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	166.177.740	161.859.700	97,40%
iv.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Peundang-Undangan	26.710.000	25.358.000	94,94%
v.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110.641.125	109.555.334	99,02%
5	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>154.856.600</b>	<b>152.203.288</b>	<b>98,29%</b>
i.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	154.856.600	152.203.288	98,29%
6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.106.156.749</b>	<b>1.093.595.881</b>	<b>98,86%</b>
i.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.996.900	11.950.000	99,61%
ii.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.027.493.183	1.051.415.181	98,82%
iii.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.616.966	46.459.000	99,66%
iv.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	331,412,972	328,079,350	98,99%
3	<b>Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi</b>	<b>49.999.800</b>	<b>47.530.000</b>	<b>95,06%</b>
1	<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>49.999.800</b>	<b>47.530.000</b>	<b>95,06%</b>
i.	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	49.999.800	47.530.000	95,06%
6	<b>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)</b>	<b>49.999.800</b>	<b>47.851.500</b>	<b>95,70%</b>

1	<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	49.999.800	47.851.500	95,70%
i.	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	49.999.800	47.851.500	95,70%
8	<b>Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan</b>	23.824.100	23.824.000	100%
1	<b>Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan</b>	14.700.000	14.700.000	100%
i.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	14.700.000	14.700.000	100%
2	<b>Penerbitan Tanda Daftar Gudang</b>	6.999.100	6.999.000	100%
i.	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	6.999.100	6.999.000	100%
3	<b>Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat</b>	2.125.000	2.125.000	100%
i.	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	2.125.000	2.125.000	100%
10	<b>Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	2.719.925.141	2.709.340.463	99,61%
1	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	2.719.925.141	2.709.340.463	99,61%
i.	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.719.925.141	2.709.340.463	99,09%
11	<b>Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</b>	143.290.000	143.261.000	99,98%

1	<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>	<b>143.290.000</b>	<b>143.261.000</b>	<b>99,98%</b>
i.	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	36.990.000	36.990.000	100%
ii.	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	106.300.000	106.271.000	99,97%
12	<b>Program Pengembangan Ekspor</b>	<b>110.550.104</b>	<b>110.469.100</b>	<b>99,93%</b>
1	<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>110.550.104</b>	<b>110.469.100</b>	<b>99,93%</b>
i.	Pameran Dagang Nasional	110.550.104	110.469.100	99,93%
13	<b>Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen</b>	<b>49.999.734</b>	<b>49.758.000</b>	<b>99,52%</b>
1	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan pengawasan</b>	<b>49.999.734</b>	<b>49.758.000</b>	<b>99,52%</b>
i.	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	49.999.734	49.758.000	99,52%
15	<b>Program Perencanaan dan Pembangunan Industri</b>	<b>546.081.300</b>	<b>386.019.979</b>	<b>70,69%</b>
1	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	<b>546.081.300</b>	<b>386.019.979</b>	<b>70,69%</b>
i.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	491.709.800	340.193.479	69,19%
iv.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	10.000.000	9.860.000	98,60%

v.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	44.371.500	35.966.500	81,06%
	<b>JUMLAH</b>	<b>15.180.827.000</b>	<b>14.624.197.662</b>	<b>96,33%</b>

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 157 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro bahwa Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten dibidang perdagangan, koperasi dan usaha mikro serta bidang perindustrian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan urusan perdagangan, koperasi dan usaha mikro serta bidang perindustrian;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan perdagangan, koperasi dan usaha mikro;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perdagangan, koperasi dan usaha mikro serta bidang perindustrian;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal yang kritis terkait dengan pelayanan SKPD dalam mengoperasionalkan tugas pokok dan fungsi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Secara umum dan normatif suatu hal yang mempengaruhi pelayanan SKPD adalah proses manajemen mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi

program/kegiatan. Proses tersebut merupakan serangkaian tahapan kritis yang harus kita kelola melalui penyusunan manajemen resiko sehingga sebelum dilaksanakan akan dapat diantisipasi atau diminimalisir dampak negatif atau penyimpangannya. Oleh karena itu setiap tahapan tersebut harus bisa dikoordinasikan dan integrasikan dengan baik dan dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.

Adapun permasalahan atau hambatan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD terkait dengan Isu-Isu penting dan strategis pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ponorogo, antara lain :

#### **A. Permasalahan**

1. Terbatasnya alokasi anggaran Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo merupakan permasalahan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya karena masih banyaknya usulan masyarakat yang belum tercover, Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo menyelenggarakan 3 urusan pilihan yaitu di bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro yang paralel dengan tugas lembaga negara di 3 (tiga) Kementerian yaitu Kementerian Perindustrian, Kementrian Perdagangan dan Kementerian Koperasi. Sehingga perlu dukungan dana yang memadai;
2. Pemahaman visi, misi, tujuan dan sasaran serta tolok ukur kinerja SKPD oleh aparatur Perangkat Daerah masih rendah, sehingga menyebabkan proses perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan di tingkat lapang seringkali masih bisa;

3. Kesulitan akses mendapatkan permodalan tanpa/dengan bunga yang kecil ke lembaga keuangan untuk UKM dan IKM yang membutuhkan permodalan sebagai pengembangan usaha, sehingga perlu dibentuk adanya lembaga oleh Pemerintah Daerah semacam Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD);
4. Kondisi sarana dan prasarana pasar di Kabupaten Ponorogo yang kurang layak sehingga perlu diadakan revitalisasi pasar;
5. Jumlah IKM di Kabupaten Ponorogo yang banyak dan berpotensi tetapi produk-produknya belum banyak dikenal oleh masyarakat lokal ataupun masyarakat luar, sehingga perlu dibangun Lingkungan Industri Kecil (LIK) sebagai tempat pengenalan produk IKM mulai dari proses produksi sampai dengan produk jadi.

#### **B. Hambatan :**

Hambatan yang dihadapi Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo kedepan dalam meningkatkan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya antara lain :

1. Keterbatasan tenaga Sumber Daya Manusia dalam mengoptimalkan fungsi pelayanan dan penyuluhan kepada masyarakat;
2. Sikap kemandirian dan ketangguhan masyarakat dalam berusaha relatif lemah; dan
3. Lemahnya dukungan permodalan bagi IKM dan UKM.

#### **C. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah :**

Adanya hambatan atau isu-isu strategis tersebut diatas secara umum tidak banyak berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, hal ini terjadi karena dalam pelaksanaan pembangunan masing-masing SKPD dengan serangkaian program/kegiatan yang dilaksanakan pada tingkat implementasinya dimasyarakat telah terjadi sinergisitas antar sektor.

Aspek partisipasi masyarakat umumnya dalam menggerakkan roda ekonomi secara makro berjalan secara normatif dan sistematis, sehingga pemerintah hanya dominan bergerak pada posisi fasilitator dan regulator, dengan syarat aspek keamanan dan iklim kondusif menjamin aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

## **D. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan SKPD**

### **1. Tantangan**

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD menjadi prioritas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi antara lain membentuk koperasi menjadi koperasi yang tangguh, professional dan mandiri; memacu pertumbuhan wirausaha baru; revitalisasi sarana perdagangan dan penataan PKL yang ada di Kabupaten Ponorogo. Semua itu untuk mewujudkan Kabupaten Ponorogo **HEBAT** (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan Takwa).

### **2. Peluang**

Adapun peluang yang potensial antara lain :

- a. Berkembangnya keberadaan Koperasi, IKM dan UKM di Kabupaten Ponorogo;

- b. Banyaknya produk-produk yang dihasilkan oleh IKM dan UKM di Kabupaten Ponorogo;
- c. Motivasi yang tinggi dari pelaku usaha;
- d. Sumber daya alam yang memadai untuk bahan baku produk industri tertentu;
- e. Kebutuhan akan barang dan jasa semakin meningkat;

### **E. Formulasi Isu-isu Strategis**

Formulasi isu-isu strategis berupa rekomendasi perumusan program dan kegiatan, antara lain :

1. Setiap program/kegiatan baik usulan dari masyarakat melalui musrenbang maupun usulan SKPD harus benar-benar dipadukan menjadi satu kesatuan program/kegiatan yang mampu menjembatani antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah;
2. Revitalisasi sarana perdagangan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan;
3. Mengoptimalkan penggunaan belanja langsung dengan melakukan efisiensi pada belanja tidak langsung, belanja pegawai, dan belanja perjalanan dinas serta memperkecil silpa yang disebabkan kurang cermatnya perencanaan;
4. Pelaksanaan program/kegiatan menekankan pada azas keadilan dan pemerataan antar wilayah dan antar kelompok masyarakat untuk mengurangi disparitas kesejahteraan; dan
5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan senantiasa dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur baik di internal SKPD antar SKPD dan antar SKPD dengan masyarakat/kelompok masyarakat penerima manfaat.

## **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Penyusunan Renja SKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam dokumen Renja SKPD memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dokumen Renja SKPD juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo.

Identifikasi atas rancangan awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan yang dikonsolidasikan dalam KUA dan PPAS sebagai Dasar penyusunan RKA SKPD sebagaimana terdapat pada tabel T-C.31.

Format C

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025  
Kabupaten Ponorogo

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO					URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO					
	<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>		<b>Prosentase Koperasi Aktif</b>	80%	10.000.000,00	<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>		<b>Prosentase Koperasi Aktif</b>	80%	10.000.000,00	
	<b>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah koperasi yang difasilitasi penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam</b>	100 Koperasi	10.000.000,00	<b>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah koperasi yang difasilitasi penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam</b>	100 Koperasi	10.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	50 Unit Usaha	10.000.000,00	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	50 Unit Usaha	10.000.000,00	
	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>		Prosentase Koperasi yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	80%	10.000.000,00	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>		Prosentase Koperasi yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	80%	20.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>		Prosentase koperasi yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	80%	10.000.000,00	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>		Prosentase koperasi yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	80%	20.000.000,00	
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	180 Unit Usaha	10.000.000,00	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	180 Unit Usaha	20.000.000,00	
	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>		<b>Prosentase Koperasi yang dinilai kesehatannya</b>	80%	10.000.000,00	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>		<b>Prosentase Koperasi yang dinilai kesehatannya</b>	80%	20.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Prosentase koperasi yang dinilai kesehatannya</b>	100%	10.000.000,0 0	<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Prosentase koperasi yang dinilai kesehatannya</b>	100%	20.000.000,0 0	
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	20 Unit Usaha	10.000.000,0 0	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	20 Unit Usaha	20.000.000,0 0	
	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>		<b>Prosentase peningkatan volume usaha koperasi</b>	10%	10.000.000,0 0	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>		<b>Prosentase peningkatan volume usaha koperasi</b>	10%	10.000.000,0 0	
			<b>Prosentase inovasi yang dihasilkan oleh koperasi</b>	27,50%				<b>Prosentase inovasi yang dihasilkan oleh koperasi</b>	27,50%	10.000.000,0 0	
	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi</b>		<b>Prosentase Koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Latihan</b>	80%	10.000.000,0 0	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi</b>		<b>Prosentase Koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</b>	80%	10.000.000,0 0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Perkoperasian</b>			<b>yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>					
			<b>Prosentase inovasi yang dihasilkan oleh koperasi</b>	27,50%				<b>Prosentase inovasi yang dihasilkan oleh koperasi</b>	27,50%	10.000.000,00	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	180 Orang	10.000.000,00	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	180 Orang	10.000.000,00	
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>		<b>Prosentase usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil dan menengah</b>	2,50%	200.000.000,00	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>		<b>Prosentase usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil dan menengah</b>	2,50%	60.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>		<b>Prosentase usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil dan menengah</b>	2,50%	200.000.000,00	<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>		<b>Prosentase usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil dan menengah</b>	2,50%	60.000.000,00	
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	10 Unit Usaha	200.000.000,00	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	10 Unit Usaha	60.000.000,00	
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN					URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN					
	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>		<b>Prosentase pelaku usaha yang mengajukan perijinan</b>	11,50%	70.000.000,00	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN</b>		<b>Prosentase pelaku usaha yang mengajukan perijinan</b>	11,50%	22.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						<b>PERUSAHAAN</b>					
	<b>Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan</b>		<b>Prosentase pelaku usaha yang mengajukan perijinan</b>	50%	50.000.000,00	<b>Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan</b>		<b>Prosentase pelaku usaha yang mengajukan perijinan</b>	50%	10.000.000,00	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10 Dokumen	50.000.000,00	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10 Dokumen	10.000.000,00	
	<b>Penerbitan Tanda Daftar Gudang</b>		<b>Prosentase penerbitan tanda daftar gudang</b>	50%	10.000.000,00	<b>Penerbitan Tanda Daftar Gudang</b>		<b>Prosentase penerbitan tanda daftar gudang</b>	50%	5.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	10.000.000,00	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	5.000.000,00	
	<b>Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat</b>		<b>Prosentase Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C</b>	50%	10.000.000,00	<b>Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat</b>		<b>Prosentase Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C</b>	50%	7.000.000,00	
	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C		Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Dokumen	10.000.000,00	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C		Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Dokumen	7.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>		<b>Prosentase peningkatan sarana distribusi perdagangan</b>	100%	1.755.075.800,00	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>		<b>Prosentase peningkatan sarana distribusi perdagangan</b>	100%	2.200.000.000,00	
	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>		<b>Indeks sarana dan prasarana perdagangan</b>	60%	1.745.075.800,00	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>		<b>Indeks sarana dan prasarana perdagangan</b>	60%	2.200.000.000,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	28 unit	1.745.075.800,00	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	28 unit	2.200.000.000,00	
	<b>Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>		<b>Indeks sarana dan prasarana perdagangan</b>	100%	10.000.000,00	<b>Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>		<b>Indeks sarana dan prasarana perdagangan</b>	100%	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	10.000.000,00	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	0	
	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>		<b>Prosentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting</b>	0,22%	110.000.000,00	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>		<b>Prosentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting</b>	0,22%	10.000.000,00	
	<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>		<b>Prosentase pengendalian harga dan stok barang penting di tingkat pasar</b>	0,22%	110.000.000,00	<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>		<b>Prosentase pengendalian harga dan stok barang penting di tingkat pasar</b>	0,22%	10.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1 Laporan	10.000.000,00	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1 Laporan	10.000.000,00	
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	100.000.000,00	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	50.000.000,00	
	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>		<b>Prosentase capaian standarisasi dan perlindungan konsumen</b>	10%	10.000.000,00	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>		<b>Prosentase capaian standarisasi dan perlindungan konsumen</b>	10%	40.000.000,00	
	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>		<b>Prosentase pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan</b>	100%	10.000.000,00	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>		<b>Prosentase pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan</b>	100%	40.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	5 Unit	10.000.000,0 0	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	5 Unit	40.000.000,0 0	
	<b>Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</b>		<b>Prosentase produk IKM/UKM yang masuk di pusat perbelanjaan dan toko swalayan</b>	100%	10.000.000,0 0	<b>Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</b>		<b>Prosentase produk IKM/UKM yang masuk di pusat perbelanjaan dan toko swalayan</b>	100%	68.000.000,0 0	
	<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>		<b>Prosentase promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri</b>	50%	10.000.000,0 0	<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>		<b>Prosentase promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri</b>	50%	68.000.000,0 0	
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	2 UMKM	10.000.000,0 0	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	2 UMKM	68.000.000,0 0	
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERINDUSTRIAN					URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERINDUSTRIAN					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>		<b>Prosentase Capaian Pelaksanaan Perencanaan dan Pengembangan Industri</b>	100%	1.540.000.000,00	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>		<b>Prosentase Capaian Pelaksanaan Perencanaan dan Pengembangan Industri</b>	100%	10000000	
	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>		<b>Prosentase Peningkatan Pelaksanaan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten</b>	100%	1.540.000.000,00	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>		<b>Prosentase Peningkatan Pelaksanaan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten</b>	100%	10.000.000,00	
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	10.000.000,00	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	10.000.000,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	10.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	10.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	10.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	10.000.000,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	10.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	40.000.000,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	1.500.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	1.500.000.000,00	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>		<b>Prosentase capaian pengelolaan sistem informasi industri nasional</b>	<b>0,25%</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>				<b>10.000.000,00</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		<b>Prosentase Penyampaian Data Industri</b>	<b>15 IKM</b>	<b>10.000.000,00</b>	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota				10.000.000,00	
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam		Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	10.000.000,00	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam		Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	10.000.000,00	
	<b>URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH (PROGRAM PENUNJANG)</b>					<b>URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH (PROGRAM PENUNJANG)</b>					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Prosentase administrasi yang memenuhi standart tata kelola pemerintah	100%	389.174.982,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Prosentase administrasi yang memenuhi standart tata kelola pemerintah	100%	58.605.282,00	
			Prosentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran perangkat daerah secara partisipasif dan tepat waktu	100%				Prosentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran perangkat daerah secara partisipasif dan tepat waktu	100%	58.605.282,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Prosentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran perangkat daerah secara partisipasif dan tepat waktu	100%	58.605.282,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Prosentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran perangkat daerah secara partisipasif dan tepat waktu	100%	58.605.282,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	29.999.800,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	29.999.800,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	28.605.482,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	28.605.482,00	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Prosentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran perangkat daerah secara partisipasif dan tepat waktu</b>	100%	8.424.919.275,00	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Prosentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran perangkat daerah secara partisipasif dan tepat waktu</b>	100%	7.378.616.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	7.430.120.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	7.378.616.000,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	974.799.775,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	1.015.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	9.999.800,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	15.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	1 Laporan	9.999.700,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	1 Laporan	15.000.000,00	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Prosentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan prasarana perangkat daerah yang memadai</b>	80%	300.000.000,00	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Prosentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan prasarana perangkat daerah yang memadai</b>	80%	1.000.000,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	300.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	1.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Prosentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan prasarana perangkat daerah yang memadai</b>	100%	664.376.500,00	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Prosentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan prasarana perangkat daerah yang memadai</b>	100%	7.565.500,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	7.565.500,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	7.565.500,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	24.924.200,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	24.924.200,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	174.954.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	145.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket	97.700.800,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket	140.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	28.500.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	32.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	330.732.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	102.397.975,00	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Prosentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	90%	10.000.000,00	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Prosentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	90%	0	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	10.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Prosentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	100%	1.057.495.760,00	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Prosentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	100%	14.996.900,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	14.996.900,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	14.996.900,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.017.574.660,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.017.574.660,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	24.924.200,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	30.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	30.569.700,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12.000.000,00	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Prosentase pelaksanaan administrasi realisasi anggaran serta pengelolaan pencatatan aset yang akutable</b>	80%	140.142.200,00	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Prosentase pelaksanaan administrasi realisasi anggaran serta pengelolaan pencatatan aset yang akutable</b>	80%	150.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	140.142.200,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	150.000.000,00	

**Tabel 4. Label T-C.31**

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi, Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Proses penyusunan Renja Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 didasarkan pada Reviu Renstra Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan yang disusun untuk Tahun 2025 disamping hasil survey kelengkapan, juga menerima masukan dan usulan dari kelompok masyarakat berupa proposal serta hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Usulan program dan kegiatan tersebut disajikan dalam tabel T-C.32.

**Format D**

**Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026  
Kabupaten Ponorogo**

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO				
	<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>		<b>Prosentase Koperasi Aktif</b>	80%	
	<b>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah koperasi yang difasilitasi penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam</b>	100 Koperasi	
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	50 Unit Usaha	
	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>		Prosentase Koperasi yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	80%	
	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>		Prosentase koperasi yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	80%	
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	180 Unit Usaha	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>		<b>Prosentase Koperasi yang dinilai kesehatannya</b>	80%	
	<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Prosentase koperasi yang dinilai kesehatannya</b>	100%	
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	20 Unit Usaha	
	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>		<b>Prosentase peningkatan volume usaha koperasi</b>	10%	
			<b>Prosentase inovasi yang dihasilkan oleh koperasi</b>	27,50%	
	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Prosentase Koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</b>	80%	
			<b>Prosentase inovasi yang dihasilkan oleh koperasi</b>	27,50%	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	180 Orang	
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>		<b>Prosentase usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil dan menengah</b>	2,50%	
	<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>		<b>Prosentase usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil dan menengah</b>	2,50%	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	10 Unit Usaha	
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN				
	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>		<b>Prosentase pelaku usaha yang mengajukan perijinan</b>	11,50%	
	<b>Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan</b>		<b>Prosentase pelaku usaha yang mengajukan perijinan</b>	50%	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10 Dokumen	
	<b>Penerbitan Tanda Daftar Gudang</b>		<b>Prosentase penerbitan tanda daftar gudang</b>	50%	
	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	
	<b>Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat</b>		<b>Prosentase Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C</b>	50%	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C		Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Dokumen	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>		<b>Prosentase peningkatan sarana distribusi perdagangan</b>	100%	
	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>		<b>Indeks sarana dan prasarana perdagangan</b>	60%	
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	28 unit	
	<b>Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>		<b>Indeks sarana dan prasarana perdagangan</b>	100%	
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	
	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>		<b>Prosentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting</b>	0,22%	
	<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>		<b>Prosentase pengendalian harga dan stok barang penting di tingkat pasar</b>	0,22%	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1 Laporan	
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	
	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>		<b>Prosentase capaian standarisasi dan perlindungan konsumen</b>	10%	
	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>		<b>Prosentase pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan</b>	100%	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	5 Unit	
	<b>Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</b>		<b>Prosentase produk IKM/UKM yang masuk di pusat perbelanjaan dan toko swalayan</b>	100%	
	<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>		<b>Prosentase promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri</b>	50%	
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	2 UMKM	
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERINDUSTRIAN				
	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>		<b>Prosentase Capaian Pelaksanaan Perencanaan dan Pengembangan Industri</b>	100%	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>		<b>Prosentase Peningkatan Pelaksanaan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten</b>	100%	
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>		<b>Prosentase capaian pengelolaan sistem informasi industri nasional</b>	<b>0,25%</b>	
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Prosentase Penyampaian Data Industri	15 IKM	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam		Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	
<b>URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH (PROGRAM PENUNJANG)</b>					
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Prosentase administrasi yang memenuhi standart tata kelola pemerintah</b>	100%	
			<b>Prosentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran perangkat daerah secara partisipasif dan tepat waktu</b>	100%	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Prosentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran perangkat daerah secara partisipasif dan tepat waktu</b>	100%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Prosentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran perangkat daerah secara partisipasif dan tepat waktu</b>	100%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Prosentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan prasarana perangkat daerah yang memadai</b>	80%	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Prosentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan prasarana perangkat daerah yang memadai</b>	100%	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Prosentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	90%	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Prosentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	100%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Prosentase pelaksanaan administrasi realisasi anggaran serta pengelolaan pencatatan aset yang akuntable</b>	80%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	

Tabel 5. Label T-C.32

### **BAB III**

## **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan. Program Perangkat Daerah merupakan program-program RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rancangan Awal Renja Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2025 disusun mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi dan usaha Mikro Tahun 2021-2026 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026. Pada tahun 2025 direncanakan ada 9 (Sembilan) program, 16 (enam belas) kegiatan, dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang akan dianggarkan melalui belanja, **format B (terlampir)**.

FORMAT B  
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025  
KABUPATEN PONOROGO

DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

No	Urusan	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)		Target				Pagu				OPD Penanggungjawab
		Semula	Menjadi	Sebelum	Menjadi	Re nja 20 25	Penjab aran APBD 2025	Peruba han Renja 2025	Satuan	Renja 2025	APBD 2025	Penjabara n APBD 2025	Perubaha n Renja 2025	
1	2	3	4						10	11	12	13	14	15
1	Koperasi dan Usaha Mikro	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	0	0	0	0	0	%	0	0	0	0	Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro

		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	0	0	0	0	0	%	0	0	0	0
		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	0	0	0	0	0	Unit Usaha	0	0	0	0
		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	Prosentase usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil dan menengah	Prosentase usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil dan menengah	2,5	2,5	2,5	%	50.000.000	50.000.000	50.000.000	47.000.000

		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Prosentase usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil dan menengah	Prosentase usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil dan menengah	2,5	2,5	2,5	%	50.000.000	50.000.000	50.000.000	47.000.000	
		Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang mengikuti kemitraan	Jumlah usaha mikro yang mengikuti kemitraan	25	25	25	Unit Usaha	50.000.000	50.000.000	50.000.000	47.000.000	
		<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN</b>	Prosentase peningkatan volume usaha koperasi	Prosentase peningkatan volume usaha koperasi	10	10	10	%	330.000.000	330.000.000	330.000.000	3.270.000.000	

		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Prosentase Koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	80	80	80	%	330.000.000	330.000.000	330.000.000	3.270.000.000	
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	270	270	270	Orang	330.000.000	330.000.000	330.000.000	3.270.000.000	
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA</b>	Prosentase administrasi yang memenuhi standart tata kelola pemerintah	Prosentase administrasi yang memenuhi standart tata kelola pemerintah	100	100	100	%	10.837.381.935	10.837.381.935	10.837.381.935	10.760.179.460	

				Prosentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran perangkat daerah secara partisipasif dan tepat waktu	Prosentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran perangkat daerah secara partisipasif dan tepat waktu	100	100	100	%					
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran perangkat daerah secara partisipasif dan tepat waktu	Prosentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran perangkat daerah secara partisipasif dan tepat waktu	100	100	100	%	8.657.772.000	8.657.772.000	8.657.772.000	8.657.772.000	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	95	95	95	orang/bulan	7.627.772.200	7.627.772.200	7.627.772.200	7.627.772.200	

		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	36	36	36	dokumen	1.015.000.000	1.015.000.000	1.015.000.000	1.015.000.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	5	5	5	laporan	14.999.800	14.999.800	14.999.800	14.999.800	
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Prosentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan prasarana perangkat daerah yang memadai	Prosentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan prasarana perangkat daerah yang memadai	4	4	4	laporan	551.150.000	551.150.000	551.150.000	551.150.000	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	15	15	15	orang	551.150.000	551.150.000	551.150.000	551.150.000	

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan prasarana perangkat daerah yang memadai	Prosentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan prasarana perangkat daerah yang memadai	100	100	100	%	467.885.275	467.885.275	467.885.275	390.682.800	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50	50	50	Paket	0	0	0	0	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	10	10	Paket	24.924.000	24.924.000	24.924.000	24.924.000	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	100	100	Paket	168.563.300	168.563.300	168.563.300	142.563.300	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	12	Paket	140.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	

		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	12	dokumen	32.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	12	laporan	102.397.975	102.397.975	102.397.975	51.195.500
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	0	0	0	0	0	%	0	0	0	0
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0	0	0	unit	0	0	0	0

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Prosentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10 0	100	100	%	1.010.574 .660	1.010.574 .660	1.010.574 .660	1.010.574 .660
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12	laporan	0	0	0	0
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	36	36	laporan	968.574.6 60	968.574.6 60	968.574.6 60	968.574.6 60
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	12	laporan	30.000.00 0	30.000.00 0	30.000.00 0	30.000.00 0
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	laporan	12.000.00 0	12.000.00 0	12.000.00 0	12.000.00 0

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pelaksanaan administrasi realisasi anggaran serta pengelolaan pencatatan aset yang akutable	Prosentase pelaksanaan administrasi realisasi anggaran serta pengelolaan pencatatan aset yang akutable	80	80	80	%	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	5	5	unit	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	
2	Perdagangan	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	Prosentase pelaku usaha yang mengajukan perijinan	Prosentase pelaku usaha yang mengajukan perijinan	80 %	11,5	11,5	%	22.000.000	22.000.000	22.000.000	17.000.000	
		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Prosentase pelaku usaha yang mengajukan perijinan	Prosentase pelaku usaha yang mengajukan perijinan	5 unit	50	50	%	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	

		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12	12	12	Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
		<b>Penerbitan Tanda Daftar Gudang</b>	<b>Penerbitan Tanda Daftar Gudang</b>	<b>Prosentase penerbitan tanda daftar gudang</b>	<b>Prosentase penerbitan tanda daftar gudang</b>	50	50	50	%	5.000.000	5.000.000	5.000.000	3.000.000	
		Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	12	12	12	Dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	3.000.000	

		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Prosentase Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Prosentase Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	50	50	50	%	7.000.000	7.000.000	7.000.000	4.000.000	
		Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12	12	12	Dokumen	7.000.000	7.000.000	7.000.000	4.000.000	
		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	Prosentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	Prosentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	100	100	100	%	2.200.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000	2.152.000.000	

		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Indeks sarana dan prasarana perdagangan	Indeks sarana dan prasarana perdagangan	60	60	60	%	2.200.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000	2.152.000.000	
		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	28	28	28	Unit	2.200.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000	2.152.000.000	
		<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>Prosentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting</b>	<b>Prosentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting</b>	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>	<b>%</b>	<b>364.000.000</b>	<b>364.000.000</b>	<b>364.000.000</b>	<b>358.400.000</b>	
		<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota</b>	<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota</b>	<b>Prosentase pengendalian harga dan stok barang penting di tingkat pasar</b>	<b>Prosentase pengendalian harga dan stok barang penting di tingkat pasar</b>	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>	<b>%</b>	<b>364.000.000</b>	<b>364.000.000</b>	<b>364.000.000</b>	<b>358.400.000</b>	

		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12	12	12	Laporan	314.000.000	314.000.000	314.000.000	311.400.000
		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barag Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barag Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12	12	12	Laporan	50.000.000	50.000.000	50.000.000	47.000.000
		<b>PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>Prosentase capaian standarisasi dan perlindungan konsumen</b>	<b>Prosentase capaian standarisasi dan perlindungan konsumen</b>	10	10	10	%	40.000.000	40.000.000	40.000.000	26.555.000

		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Prosentase pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan	Prosentase pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan	100	100	100	%	40.000.000	40.000.000	40.000.000	26.555.000
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1000	1000	1000	UTTP	40.000.000	40.000.000	40.000.000	26.555.000
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA</b>	Prosentase administrasi yang memenuhi standart tata kelola pemerintah	Prosentase administrasi yang memenuhi standart tata kelola pemerintah	100	100	100	%	73.605.082	73.605.082	73.605.082	73.605.082



		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran perangkat daerah secara partisipatif dan tepat waktu	Prosentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran perangkat daerah secara partisipatif dan tepat waktu	100	100	100	%	58.605.282	58.605.282	58.605.282	58.605.282
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah yang disusun	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah yang disusun	6	6	6	dokumen	29.999.800	29.999.800	29.999.800	29.999.800
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	18	18	18	Laporan	28.605.482	28.605.482	28.605.482	28.605.482

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran perangkat daerah secara partisipatif dan tepat waktu	Prosentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran perangkat daerah secara partisipatif dan tepat waktu	100	100	100	%	14.999.800	14.999.800	14.999.800	14.999.800	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	4	4	4	laporan	14.999.800	14.999.800	14.999.800	14.999.800	

3	Perindustrian	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>Prosentase Capaian Pelaksanaan Perencanaan dan Pengembangan Industri</b>	<b>Prosentase Capaian Pelaksanaan Perencanaan dan Pengembangan Industri</b>	100	100	100	%	2.179.893.842	2.179.893.842	2.179.893.842	2.164.438.842
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Prosentase Peningkatan Pelaksanaan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	Prosentase Peningkatan Pelaksanaan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	100	100	100	%	2.179.893.842	2.179.893.842	2.179.893.842	2.164.438.842
		Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1	1	1	Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	3.945.000
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	1	1	Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000

		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1	1	1	Dokumen	100.000.000	100.000.000	100.000.000	95.600.000	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	6	6	6	Dokumen	39.999.700	39.999.700	39.999.700	34.999.700	



		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	6	6	6	Dokumen dan Pelatihan	2.019.894.142	2.019.894.142	2.019.894.142	2.019.894.142	
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>Prosentase capaian pengelolaan sistem informasi industri nasional</b>	<b>Prosentase capaian pengelolaan sistem informasi industri nasional</b>	100	100	100	%	10.000.000	10.000.000	10.000.000	6.000.000	
		<b>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota</b>	<b>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota</b>	<b>Prosentase Penyampaian Informasi Industri</b>	<b>Prosentase Penyampaian Informasi Industri</b>	100	100	100	%	10.000.000	10.000.000	10.000.000	6.000.000	

		Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1	1	1	Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	6.000.000	
--	--	---	---	--	--	---	---	---	---------	------------	------------	------------	-----------	--

## **BAB IV PENUTUP**

Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun. Renja SKPD tahun 2025 merupakan penjabaran Reviu Renstra SKPD yang memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran.

Dengan disusunnya Renja SKPD Tahun 2025, Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan lebih terintegrasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Namun demikian, proses pembangunan memerlukan peran serta seluruh masyarakat, baik pemerintah, legislatif, maupun masyarakat itu sendiri.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kerjasama dari semua pihak sangat diperlukan demi suksesnya pembangunan yang menjadikan kehidupan menjadi lebih baik di masa datang, serta mewujudkan Kabupaten Ponorogo yang lebih maju, berbudaya dan religius sehingga menjadikan Kabupaten Ponorogo meningkat tingkat kesejahteraannya.